

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada April 2008, kelompok studi mahasiswa “Eka Prasetya UI” melakukan survey mengenai intensi mahasiswa UI untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 (dalam Angela H., 2008). Survey tersebut dilaksanakan pada April 2008 terhadap 936 mahasiswa UI. Hasilnya, hanya 51.3% responden yang berintensi untuk memilih pada Pemilu 2009, 48.7% sisanya menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia tidak akan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan sebuah indikator paling sederhana untuk melihat tingkat keterlibatan politik pada masyarakat (Casciano, 1999). Berdasarkan pendapat Casciano tersebut, rendahnya intensi mahasiswa Universitas Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum 2009 dapat dijadikan sebagai indikator bahwa tingkat keterlibatan politik mereka adalah rendah.

Keterlibatan politik individu berkaitan dengan berbagai hal, Casciano (2007) misalnya menyatakan bahwa keterlibatan individu dalam politik berkaitan erat dengan tingkat pengetahuannya tentang politik. Proporsi umumnya adalah bahwa tingkat pengetahuan individu mengenai pemerintah dan politik akan membawanya pada kesadaran politik (*political awareness*) sehingga ia menjadi terdorong untuk terlibat dalam politik, termasuk dalam proses pemilihan umum.

Tingkat pengetahuan individu mengenai politik dan pemerintahan tersebut diperoleh dari proses sosialisasi politik (*political socialization*). Proses ini merupakan konstruksi kognisi saat individu diperkenalkan dengan berbagai konsep politik dan pemerintahan oleh orang-orang terdekat atau lingkungannya sehingga menghasilkan pengetahuan dan pemahaman tertentu mengenai politik (Doise & Staerklé, 2002). Individu yang mendapatkan sosialisasi politik sejak

kecil dari orang tuanya akan mendapat lebih banyak pengetahuan tentang politik sehingga ketika dewasa ia lebih terdorong untuk terlibat dalam politik.

Proses sosialisasi politik memang dapat diperoleh sejak usia dini, namun masa krusialnya terjadi pada saat individu berada pada tahap perkembangan remaja akhir dan dewasa awal (Lerner & Steinberg, 2004 dalam Flanagan, 2004), karena pada tahap ini ia sedang melakukan konsolidasi konsep dan identitas politiknya (Marcia, 1993). Pada tahap ini pula seseorang biasanya mulai terlepas dari peran sosialisasi politik orang tuanya dan cenderung lebih banyak dipengaruhi lingkungannya (Alwin, Cohen, & Newcomb, 1991 dalam Flanagan, 2004). Ia kemudian akan mencoba untuk mengelaborasi konsep politik yang disosialisasikan orang tuanya dengan konsep yang ia pelajari dari lingkungannya saat itu. Partisipasi individu di lingkungan dan dalam berbagai kegiatan yang memperluas wawasannya dalam bidang politik akan semakin mendorong seseorang untuk terlibat dalam politik secara aktif.

Lingkungan yang dianggap berkaitan erat dengan keterlibatan aktif individu dalam politik pada tahap remaja akhir dan dewasa awal adalah bangku kuliah. Hasil penelitian Jennings (1993) (dalam Flanagan, 2004) menunjukkan bahwa individu pada tahap remaja akhir dan dewasa awal yang pernah kuliah akan memiliki sikap dan keterlibatan politik yang lebih stabil di masa dewasanya dibandingkan dengan individu yang tidak kuliah. Bangku kuliah dianggap dapat memberikan berbagai kegiatan yang dapat menambah wawasan politik seseorang sehingga membuatnya lebih terdorong untuk terlibat secara aktif dalam politik, misalnya kegiatan kuliah di kelas, diskusi dengan sesama mahasiswa, berorganisasi, dsb.

Kegiatan organisasi dianggap lebih berkaitan erat terhadap keterlibatan politik. Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan individu dalam perkumpulan dan organisasi yang berbasis komunitas, serta dalam berbagai kegiatan ekstra-kurikuler berkaitan erat dengan keterlibatannya dalam politik dan kewarganegaraannya, baik saat itu (Quintelier, 2008), maupun ketika ia sudah berada pada tahap usia selanjutnya (Youniss, McLellan, & Yeats, 1997 dalam Flanagan 2004). Hal ini dikarenakan dalam organisasi, individu akan mempelajari

secara langsung berbagai keterampilan dan pemahaman yang berkaitan dengan politik, seperti kemampuan untuk bertukar gagasan, menghadapi gagasan-gagasan yang berbeda, menjalankan suatu gagasan, dan mengawasi proses pelaksanaannya. Proses-proses yang dipelajari individu tersebut merupakan proses politik yang sederhana dan serupa dengan berbagai proses demokrasi dalam konteks nyata. Selain itu, kegiatan-kegiatan organisasi dapat membuka wawasan individu untuk melihat realita sosial politik masyarakat (Quintelier, 2008). Hal ini dapat menggugah sisi afeksi individu untuk mau terlibat dalam proses perbaikan sosial politik.

Hal sebaliknya, justru dikemukakan Nurohman (2007) dalam penelitiannya mengenai keterlibatan politik (*political engagement*) pada mahasiswa Universitas Indonesia. Hasil penelitiannya ternyata menunjukkan bahwa organisasi dan jumlah organisasi yang diikuti mahasiswa tidak berhubungan secara signifikan dengan keterlibatan politik. Kondisi berlawanan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, terlebih karena dalam penelitian tersebut Nurohman tidak melakukan klasifikasi terhadap variabel organisasi, sementara penelitian Quintelier (2008) menunjukkan bahwa jenis organisasi yang berbeda akan menghasilkan partisipasi politik individu yang juga berbeda. Individu yang bergabung dalam organisasi yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti organisasi sukarelawan memiliki keterlibatan yang lebih tinggi daripada individu yang terlibat dalam organisasi yang bersifat peminatan, misalnya organisasi relijius, klub basket, dsb.

Selain itu Quintelier pun menyatakan bahwa jumlah organisasi memiliki hubungan signifikan terhadap partisipasi politik. Semakin banyak organisasi yang diikuti seseorang, maka semakin banyak stimulasi politik yang diperoleh yang dapat membuka dan menambah cakrawala pengetahuannya tentang politik, hal ini akan mendorongnya untuk dapat lebih terlibat dalam politik.

Organisasi dan individu mahasiswa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam catatan sejarah Indonesia, berbagai fakta sejarah terbentuk melalui keterlibatan politik mahasiswa dan organisasinya. Di Universitas Indonesia sendiri terdapat berbagai organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat

fakultas maupun universitas. Organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut memiliki keberagaman dalam kegiatan, manajemen organisasi, aturan organisasi, dan tujuan organisasinya. Perbedaan kegiatan ini tentu akan menghasilkan proses edukasi atau sosialisasi politik yang berbeda, hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk dikaji lebih lanjut. Seperti yang diungkapkan Quintelier (2008), individu pada jenis organisasi yang berbeda tentunya akan memiliki tingkat keterlibatan politik yang berbeda, begitu pula dalam konteks organisasi dan kemahasiswaan di Universitas Indonesia. Peneliti beranggapan bahwa mahasiswa yang berada pada satu jenis organisasi kemahasiswaan akan memiliki tingkat keterlibatan politik yang berbeda dengan mahasiswa pada jenis organisasi kemahasiswaan lain.

Apabila terbukti bahwa perbedaan jenis organisasi tersebut berkaitan dengan tingkat keterlibatan politik pada mahasiswa, maka hal ini dapat menjadi masukan dan perhatian penting bagi pemerintah dan pihak rektorat untuk lebih memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk mengeksplor dirinya dalam organisasi, sekaligus mengarahkan mahasiswa untuk lebih terlibat pada organisasi pada jenis tertentu untuk meningkatkan keterlibatan politik mahasiswa sebagai generasi muda yang akan meneruskan proses demokrasi di Indonesia.

Di samping itu, penelitian ini dilakukan untuk menanggapi hasil penelitian Nurohman (2007) yang justru menunjukkan bahwa organisasi tidak berperan secara signifikan terhadap keterlibatan politik pada mahasiswa. Perbedaan jenis organisasi ini dan sangkut pautnya terhadap keterlibatan politik pada mahasiswa Universitas Indonesia lah yang akan menjadi topik utama dalam penelitian ini.

1.2. Masalah Penelitian

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi merupakan media sosialisasi politik yang berkaitan erat dengan tingkat keterlibatan politik karena organisasi dapat memberikan pengalaman nyata yang serupa dengan kondisi politik dan demokrasi yang sesungguhnya. Ternyata tidak semua jenis organisasi menghasilkan tingkat keterlibatan politik yang sama, individu pada satu jenis organisasi bisa jadi memiliki tingkat keterlibatan politik yang berbeda dengan individu di organisasi lain. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti, terlebih

setelah melihat fenomena organisasi kemahasiswaan di Universitas Indonesia. Dengan demikian fenomena ini menjadi topik utama dalam penelitian ini. Redaksi permasalahan yang diangkat peneliti pada penelitian ini adalah:

“Apakah jenis organisasi kemahasiswaan berkaitan secara signifikan dengan tingkat keterlibatan politik (*political engagement*) mahasiswa Universitas Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat keterlibatan politik mahasiswa Universitas Indonesia di berbagai jenis organisasi kemahasiswaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik teoritis maupun praktis. Pertama, penelitian ini dapat turut mengembangkan penelitian Psikologi Politik di Indonesia karena penelitian dalam bidang ini masih jarang dilakukan.

Kedua, secara teoritis penelitian ini mengembangkan penelitian mengenai keterlibatan politik yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggali faktor organisasi secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan keterlibatan politik sehingga diperoleh gambaran dan sudut pandang berbeda mengenai masalah ini.

Ketiga, secara praktis penelitian ini dapat digunakan dalam usaha peningkatan keterlibatan politik pada generasi muda. Di Amerika, pemerintahnya memperbanyak organisasi-organisasi sukarelawan karena ternyata organisasi ini sangat signifikan terkait dengan keterlibatan politik warganya, baik di masa muda maupun ketika mereka beranjak dewasa (Flanagan, 2004). Apabila penelitian ini membuktikan bahwa jenis organisasi tertentu lebih berkaitan secara signifikan terhadap keterlibatan politik pada generasi muda –dalam hal ini adalah mahasiswa, maka hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk proaktif membangun organisasi serupa untuk generasi muda jika

pemerintah dan pihak-pihak tertentu memang berintensi untuk ingin meningkatkan keterlibatan politik generasi muda.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini meliputi BAB 1: Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah dan fenomena yang diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta sistematika penulisan hasil penelitian itu sendiri.

BAB 2: Tinjauan Pustaka. Bab ini menyajikan berbagai penjelasan yang berkaitan dengan variabel-variabel masalah penelitian ini, meliputi definisi organisasi, dimensi-dimensi serta jenis-jenisnya, konstruk mengenai keterlibatan politik (*political engagement*), serta dinamika hubungan antara jenis organisasi dengan keterlibatan politik pada mahasiswa.

BAB 3: Metodologi Penelitian. Bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, variabel-variabel penelitian, masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian, instrumen penelitian, serta penjelasan tentang tahap-tahap pelaksanaan penelitian.

BAB 4: Hasil dan Analisa. Bab ini mengemukakan hasil pengolahan data penelitian berdasarkan prosedur yang telah disusun sebelumnya, serta interpretasi terhadap hasil pengolahan data tersebut yang memberikan hasil penelitian.

BAB 5: Kesimpulan, Diskusi, dan Saran. Pada bab ini disimpulkan hasil temuan penelitian yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Pada bab ini pun dikemukakan saran-saran penelitian yang berkaitan dengan evaluasi penelitian secara menyeluruh, serta saran-saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya berdasarkan proses dan hasil penelitian ini.